LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
BULAN FEBUARI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Selasa, 27 Februari 2024

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 11,94 %

b. Keuangan = 2.538.293.854 (11,35%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.600.000			300.000		
1	Rakor Koordinasi Forum OPD Renstra dan Renja	25.600.000	100	0	300.000	(100)	Menunggu jadwal Forum PD yang ditentukan TAPD dan DPRD Jateng
Administrasi Umum Perangkat Daerah							

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.680.000			5.035.000		
1	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.680.000	16,22	15,41	5.035.000	(0,81)	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90.800.000			0		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.800.000	6,60	0	0	(6,60)	Kegiatan sesuai kebutuhan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	13.250.000			1.000.000		
1	Fasilitasi Partisipasi Anak dalam Pemenuhan Hak Anak	13.250.000	12	5	1.000.000	(7)	uang harian forum anak belum dispjkan karena rekeningnya belum sesuai
	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	17.200.000			6.100.000		
1	Koordinasi dan Pemantauan Capaian Pengembangan KLA	17.200.000	41,28	35,47	6.100.000	(5,81)	1 narasumber akan dipakai saat rapat koordinasi tim VA Provinsi
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi	14.500.000			14.324.000		

1	Pelaksanaan Penyediaan Bantuan Kebutuhan Khusus bagi AMPK	14.500.000	100	98,79	14.324.000	(1,21)	
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	6	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

-

Upaya

-

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Rakor FKKG Provinsi Jawa Tengah (PP)
2. Rakor Forum PUSPA Provinsi Jawa Tengah (PP)
3. Peningkatan Kapas Fasilitator (PP)
4. Pertemuan Koordinasi dan Kerjasama Lintas Sektor dalam pencegahan Ktp/A (PP)
5. Rakor PUG OPD Provinsi (KG)
6. Rakor PUG Kab/Kota (KG)
7. sosialisasi penurunan angka stunting melalui kegiatan BKB di kab. magelang (KS)
8. sosialisasi penurunan angka stunting dan AKI melalui kelompok BKR di kab. pemalang (KS)
9. workshop advokasi peningkatan kualitas hidup lansia melalui kelompok BKL di kab.banyumas (KS)
10. Rakor pencegahan kekerasan terhadap anak (PA)
11. Penyediaan bantuan khusus bagi AMPK (PA)
12. Rapat koordinasi kab/kota layak anak (PHA)
13. Safari Pelayanan KB (KB)

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. ApabilaÂ target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;
7. Dimohon rutin menginput realisasi non tender dan swakelola pada LPSE tiap bulan

8. SPJ harus di selesaikan di Akhir bulan, agar selanjutnya dapat diverifikasi oleh masing-masing verifikator
9. Masing-masing verifikator menyerahkan hasil verifikasinya untuk segera diselesaikan. Apabila kekurangan sudah dipenuhi/diselesaikan, verifikator mencatat hal-hal yang sudah diselesaikan melalui link.
10. Verifikator dihimbau untuk melihat hasil temuan/verifikasi bidang lain, apabila ada kemungkinan temuan yang sama.
11. Menyusun GAP-GBS Tahun 2024 masing-masing bidang

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Februari 2024, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Selasa, 27 Februari 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Dra. RETNO SUDEWI, Apt,MSi,MM

NIP. 196811241993102001